



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

IMPOR KERETA REL LISTRIK BEKAS DARI JEPANG BATAL

Yosephus Mainake

Analisis Legislatif Ahli Pertama
yosephus.mainake@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang dibatalkan. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menggelar rapat dengan pemangku kepentingan terkait. Hal ini dikarenakan kebijakan impor KRL bekas melanggar tiga peraturan, yaitu Peraturan Presiden, Peraturan Kementerian Perhubungan, dan Peraturan Kementerian Perindustrian.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa ada empat hal terkait hasil dari proses audit mengenai rencana impor KRL bekas dari Jepang. *Pertama*, rencana impor KRL bekas dinilai tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 175 Tahun 2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri telah menetapkan persyaratan umum pengadaan kereta berkecepatan normal dengan penggerak sendiri termasuk KRL harus memenuhi spesifikasi teknis dimana salah satunya adalah mengutamakan produk dalam negeri. *Kedua*, permohonan dispensasi impor KRL bekas tidak setuju oleh Kementerian Perdagangan dengan alasan bahwa pemerintah fokus untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan kebijakan Kementerian Perdagangan terkait kebijakan dan pengaturan impor dijelaskan bahwa barang bukan baru atau bekas yang bisa diimpor oleh Indonesia, salah satunya adalah barang yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri. *Ketiga*, Laporan BPKP Tahun ini menyatakan bahwa masih ada sarana yang bisa dioptimalkan oleh PT KCI untuk menunjang operasi *commuter line*. *Keempat*, pembengkakan estimasi biaya impor KRL dari Jepang. Pembengkakan kemungkinan bisa terjadi untuk biaya penanganan kargo dan pengiriman kereta bekas dari Jepang ke Indonesia. Hasil audit BPKP berisi rekomendasi BPKP ke para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan impor KRL bekas dari Jepang.

Pemerintah menolak usulan PT KCI untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang. Ini disebabkan ada ketidakwajaran biaya terkait pengadaan impor KRL bekas dari Jepang. Hal tersebut disampaikan Deputy Koordinator Pertambangan dan Investasi, Septian Hario Seto, saat menghadiri acara Konferensi Pers dalam rangka pengadaan kereta impor di Kemenko Marves.

Pemerintah menegaskan bahwa penambahan rangkaian KRL bekas dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan peremajaan armada PT KCI atau KAI Commuter bisa diganti dengan skema lain. Untuk pemenuhan kebutuhan rangkaian KRL dalam jangka pendek, pemerintah memilih opsi *retrofit* atau memperbaiki teknologi dan suku cadang pada rangkaian KRL lama. Selanjutnya, pemerintah berencana melakukan impor KRL baru sebanyak tiga rangkaian (*trainset*) untuk mengantisipasi kebutuhan armada selama menjalankan opsi *retrofit*. Tujuan impor KRL baru adalah untuk menutupi potensi kemungkinan terjadinya kekurangan armada. Di masa mendatang, pemerintah menuturkan bahwa pemenuhan kebutuhan rangkaian KRL pada 2025 dan selanjutnya dilakukan di dalam negeri. Pemerintah menegaskan pembangunan

KRL baru dilakukan oleh PT Industri Kereta Api (PT INKA) pada fasilitas produksinya di wilayah Banyuwangi dan Madiun, Provinsi Jawa Timur. Saat ini, PT KCI dan PT INKA berupaya agar kereta yang menuju konservasi tersebut bisa dilakukan *retrofit* atau dimodernkan sebagai antisipasi sebelum kereta baru disiapkan.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) (Persero), Didiék Hartantyo, mengatakan bahwa larangan impor KRL bekas asal Jepang oleh pemerintah akan berdampak pada pembengkakan nilai investasi PT KAI untuk pengadaan kereta baru. Selain itu, juga berdampak terhadap pembengkakan pada *public service obligation* (PSO) atau subsidi tarif untuk masyarakat. Namun, Didiék Hartantyo menegaskan bahwa PT KAI akan mengikuti arahan dari pemerintah. Dengan demikian, tidak akan ada impor KRL bekas dan kereta akan disuplai oleh PT INKA. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,3 triliun untuk produksi KRL dalam negeri.

Pemerintah memastikan bahwa pembatalan impor tersebut tidak akan mengganggu kegiatan operasional kereta *commuter line* Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Pemerintah melalui Menko Marves mengatakan bahwa Indonesia tetap membutuhkan impor KRL namun kereta baru. Adapun, terkait keputusan impor tiga rangkaian KRL baru merupakan keputusan rapat bersama. Untuk memesan kereta baru dibutuhkan waktu dua tahun sehingga pemerintah memprioritaskan *retrofit* terhadap unit gerbong yang dimiliki saat ini.

Atensi DPR

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan bahwa pemerintah batal membeli KRL bekas dari Jepang untuk KAI *commuter line*. Sebagai gantinya, pemerintah akan impor KRL baru sebanyak tiga rangkaian (*trainset*) untuk menggantikan KRL yang akan pensiun tahun depan. Namun, pemesanan KRL baru membutuhkan waktu satu sampai dua tahun. Meski kran impor KRL baru tetap dibuka, pemerintah mengatakan tetap memprioritaskan pemenuhan KRL melalui produksi PT INKA Banyuwangi dan Madiun. DPR RI khususnya Komisi VI mengatakan bahwa Indonesia perlu melakukan rekonstruksi ulang bisnis industri kereta api. Hal ini disebabkan Indonesia melalui PT INKA dinilai memiliki industri manufaktur sarana kereta api terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Komisi VI perlu melakukan pengawasan terkait impor kereta baru untuk mengantisipasi kebutuhan armada selama berjalan opsi *retrofit*. Selanjutnya, juga perlu memastikan ketersediaan suku cadang pada rangkaian kereta lama yang akan diperbarui melalui *retrofit*.

Sumber

Bisnis Indonesia, 23 Juni 2023;
finance.detik.com, 24 Juni 2023;
republika.co.id, 22 Juni 2023;
sindonews.com, 23 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.